

▼ Rubrik

Berita Utama

International

Metropolitan

Naper

Nusantara

Bisnis & Investasi

Finansial

Opini

Olahraga

Jawa Barat

Pemilihan Presiden
2004

Politik & Hukum

Humaniora

▶ Berita Yang lalu

▶ Jendela

▶ Otonomi

▶ Audio Visual

▶ Rumah

▶ Teknologi
Informasi

▶ Dana Kemanusiaan

▶ Pustakaloka

▶ Otomotif

▶ Furnitur

▶ Agroindustri

▶ Musik

▶ Muda

▶ Swara

▶ Fokus

▶ Perbankan

▶ Telekomunikasi

▶ Makanan dan
Minuman▶ Ekonomi
Internasional

▶ Properti

▶ Interior

▶ Sorotan

▶ Kesehatan

▶ Teropong

▶ Ekonomi Rakyat

▶ Wisata

KOMPAS

Melawan Amnesia Sejarah

Oleh Baskara T Wardaya

BARU-baru ini di Yogyakarta diselenggarakan acara diskusi buku berjudul Memoar Pulau Buru karya Hersri Setiawan. Dalam pembahasan atas buku yang berisi catatan-catatan penulis tentang pengalaman getirnya sebagai tahanan politik Orde Baru itu mencuatlah topik amnesia sejarah. Ditengarai, banyak warga negeri ini sedang dilanda gejala amnesia sejarah atau "lupa ingatan" akan masa lalu masyarakatnya sendiri (Kompas edisi Jateng dan Jogja, 10/5/2004).

Harus diakui, dewasa ini ada kecenderungan, banyak peristiwa masa lalu yang sebenarnya penting diingat dan direfleksikan bersama justru makin dilupakan. Pun seandainya diingat, sering kali ingatan akan masa lalu itu bersifat selektif dan parsial. Sering pula ingatan itu melulu didasarkan "penjelasan resmi" pejabat negara atau keterangan pihak pemenang dalam suatu konflik. Jarang didengarkan bagaimana pengalaman dan kesaksian dari pihak korban.

Tak mengherankan, sebagaimana dikeluhkan dalam harian ini, atas tragedi berdarah Mei 1998 "suara korban mulai tak didengar..." (Kompas, 12/5/2004). Berbagai kekejaman yang dialami ratusan (bahkan ribuan) anak bangsa saat itu seakan mau dilupakan begitu saja.

Akibat mewabahnya amnesia ini, berbagai bentuk pelanggaran atas hak-hak warga negara dan prinsip-prinsip keadilan yang terjadi di masa lalu dianggap enteng dan tak pernah terolah secara matang. Jarang sekali pelanggaran-pelanggaran itu secara teliti dilihat apa latar belakangnya, siapa pelakunya, siapa saja korbannya, apa dampaknya, bagaimana harus disikapi, dan sebagainya.

Akibat lebih jauh, sejumlah individu yang di masa silam merupakan pelaku pelanggaran berat hak-hak asasi manusia (HAM) kini tersenyum-senyum bebas tanpa rasa bersalah (apalagi menyesal). Bila perlu menjadi "tokoh masyarakat". Konsekuensinya, ketidakadilan yang terjadi di masa lalu dapat terulang kembali.

Sengaja

Bila dicermati, kini langit politik Indonesia makin tampak diwarnai mendung amnesia sejarah. Ada kesan, masyarakat makin lupa atas apa yang terjadi selama 32 tahun hidup di bawah sebuah rezim yang totaliter dan represif, hingga sepertinya orang tak keberatan bila unsur-unsur militer dan politik yang dulu ikut mendukung rezim itu kembali berkuasa di negeri ini. Gejala macam ini tentu amat memprihatinkan, terutama jika hal berkaitan dengan berbagai kekejaman militeristik sebuah rezim terhadap rakyatnya sendiri sebagaimana



Berita Lainnya :

- [TAJUK RENCANA](#)
- [REDAKSI YTH](#)
- [Gus Dur dan Politik Tebar Jala](#)
- ["Friendly Dictatorship"](#)
- [Melawan Amnesia Sejarah](#)

- ▶ [Bentara](#)
- ▶ [Pengiriman & Transportasi](#)
- ▶ [Investasi & Perbankan](#)
- ▶ [Pendidikan Dalam Negeri](#)
- ▶ [Pendidikan Luar Negeri](#)
- ▶ [Bahari](#)
- ▶ [Esai Foto](#)
- ▶ [Ilmu Pengetahuan](#)
- ▶ [Pixel](#)
- ▶ [Bingkai](#)
- ▶ [Pergelaran](#)
- ▶ [Didaktika](#)
- ▶ [Pendidikan](#)
- ▶ [Info Otonomi](#)
- ▶ [Tentang Kompas](#)
- ▶ [Kontak Redaksi](#)

digambarkan dalam memoar di atas.

Namun, rupanya amnesia sejarah bukan melulu disebabkan faktor kebetulan. Semakin kelihatan, ia juga merupakan produk suatu kesengajaan. Tampaknya ada sejumlah kalangan di Republik ini yang ingin dengan sengaja meng- amnesia-kan masyarakat dari sejarahnya sendiri. Momen-momen khusus dalam sejarah yang sebenarnya penting sebagai titik pijak refleksi bersama justru ditutup dengan sesuatu yang lain, bagai kuburan massal yang ditutupi dengan pepohonan.

Ambil contoh berikut. Dari sejarah bangsa ini kita tahu, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno menandatangani "Supersemar" yang, di luar kemauannya, lalu dimanfaatkan untuk legitimasi suatu kekejaman massif dan pemindahan kekuasaan secara bertahap. Berkat apa yang terjadi pada tanggal itu, supremasi sipil dalam menyelenggarakan negara direbut dari tangan mereka. Hal serupa juga pernah terjadi sebelumnya, yakni tanggal 5 Juli 1959. Saat itu Bung Karno didesak Kasad Nasution untuk mengumumkan Dekrit Presiden, yang salah satu pokoknya memberikan jalan lapang bagi militer untuk ikut campur tangan dalam urusan politik sipil.

Herannya, entah disengaja entah tidak, masa kampanye resmi Pemilu 2004 dimulai 11 Maret. Sementara itu, menurut rencana pemilihan presiden 2004 akan dilaksanakan tanggal 5 Juli. Pemilihan tanggal-tanggal itu bisa berakibat masyarakat makin tak peduli akan apa yang terjadi pada tanggal-tanggal yang sama di tahun 1959 dan 1966. Padahal apa yang terjadi pada tanggal-tanggal itu memiliki dampak luar biasa dalam sejarah bangsa ini. Seandainya pemilihan kedua tanggal itu didasarkan kesengajaan agar orang lupa akan sejarah, hal itu tentu amat menyedihkan. Tetapi, jika dasarnya "hanya"-lah ketidaksengajaan, hal itu justru menggarisbawahi betapa parahnya penyakit amnesia sejarah itu.

Timbul dugaan, jangan-jangan hal-hal macam itu dilakukan atas dasar kekhawatiran, jika masyarakat menjadi sadar akan sejarahnya banyak posisi dan keuntungan yang menyenangkan milik segelintir elite akan terancam. Dalam kasus pembantaian massal 1965-1966 dan pembuangan ke Pulau Buru, misalnya, bisa jadi penceritaan kembali (baca: pembongkaran mitos-mitos) atas peristiwa itu akan menimbulkan dampak amat serius terhadap kalangan sipil maupun militer tertentu karena makin kuatnya dugaan keterlibatan mereka. Akibatnya, banyak elemen dalam kalangan itu enggan membahas berbagai pelanggaran HAM dan keadilan di masa lalu secara tuntas.

Lebih jauh harus diakui, amnesia juga didukung lemahnya minat untuk belajar sejarah, termasuk di perguruan tinggi. Di negeri ini, perguruan tinggi yang memiliki Jurusan Sejarah tidak banyak. Sementara itu, buku-buku teks yang ada masih cenderung diwarnai pandangan "sejarah resmi" yang dimaksudkan untuk mendukung mereka yang berkepentingan dan berkuasa. Geliat untuk mempelajari sejarah secara lebih terbuka akhir-akhir ini muncul, namun masih pada tahap permulaan sehingga amnesia sejarah masih merupakan penyakit sosial yang meluas.

Kesadaran sejarah

Guna melawan penyakit macam itu, perlulah kiranya digalakkan semacam gerakan bersama melawan amnesia sejarah. Untuk itu, pertama, perlu dikembangkan upaya-upaya agar semakin banyak masyarakat bisa belajar sejarah secara lebih terbuka, lebih sehat, dan lebih menarik, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Sebagai disiplin ilmu, sejarah merupakan bidang akademis yang dapat mendidik individu untuk bersikap kritis karena ia merupakan ilmu yang terbuka atas berbagai interpretasi, verifikasi, falsifikasi, dan sebagainya. Proses pembelajaran sejarah yang dimonopoli dan

- [Siklus](#)
- [Otoritarianisme Dunia Ketiga](#)
- [Mengapa Wiranto](#)
- [Kaparkan Akbar?](#)
- [Tokoh Pemersatu Hidup Beragama](#)
- [Desa Industri](#)
- [Berkas Pertanian Industri](#)
- [Generasi Baru](#)
- [Petani dan Masalah Akses Lahan](#)
- [POJOK](#)

direkayasa demi aneka kepentingan tertentu yang eksklusif perlu semakin dihindari. Sementara itu berbagai metode dan metodologi sejarah penting untuk terus dikembangkan dan dimanfaatkan.

Kedua, perlu makin digalakkan kesadaran sejarah di masyarakat luas. Berbagai cara sebaiknya ditempuh guna merangsang masyarakat agar kian tertarik sejarah. Berbagai ragam alat komunikasi publik yang tersedia luas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ini.

Diharapkan, masyarakat yang sadar sejarah akan semakin mampu belajar dari masa lalunya sendiri maupun masa lalu orang lain. Kegagalan untuk belajar sejarah bisa membuat berbagai kekejaman militeristik seperti dialami Hersri Setiawan dan ribuan tahanan politik Pulau Buru yang lain itu terulang kembali.

Selanjutnya diharapkan, meluasnya minat dan kesadaran sejarah baik di kalangan akademisi maupun masyarakat luas akan membantu upaya perwujudan keadilan, kebenaran, rekonsiliasi, serta penghormatan nilai-nilai manusia-sebagai-manusia di negeri ini. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang semakin mampu menghormati nilai-nilai kehidupan dan hak-hak para warganya.

Baskara T Wardaya SJ *Dosen Sejarah di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*